



DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan. LAKIP merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020-2024.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini juga sebagai alat umpan balik untuk melakukan perbaikan dan perencanaan terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dengan laporan ini juga diharapkan dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi yang obyektif terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak oleh pihak lain yang berhak dan berkepentingan dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban, serta dapat memenuhi harapan masyarakat yaitu dalam merwujudkan "*clean government dan good governance*".

Pontianak, Januari 2023

Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak



Dra. Hj. UTIN SRI LENA CANDRAMIDI, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19680410 199503 2 006

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Perhubungan sebagai unsur teknis pelaksanaan otonomi daerah di Kota Pontianak yang melaksanakan kewenangan di bidang Perhubungan serta tugas desentralisasi Pemerintah Kota Pontianak.

Sebagai sebuah Unit Kerja tentunya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perlu adanya penilaian dan evaluasi. Secara umum dalam tahun 2022 Dinas Perhubungan Kota Pontianak telah mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama Kota yang dijadikan IKU Dinas yaitu rata-rata waktu tempuh dengan capaian kinerja dalam kategori **Sangat Berhasil** merupakan sasaran RPJMD atau Tujuan Renstra. Dan Indikator Kinerja Utama Dinas dari sasaran strategis terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Indikator Kinerja Tingkat Kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak dengan kategori **Berhasil** dan Indikator Kinerja Tingkat Kinerja Pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan dengan kategori **Sangat Berhasil**. Berikut capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2022.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1. Meningkatnya Kualitas Transportasi	1. Rata-Rata Waktu Tempuh	Jam	0,05	0,035	130	Sangat Berhasil
2. Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2. Tingkat kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak	Kategori	B (80)	B (93,31)	B (74,65)	Berhasil
3. Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	3. Tingkat kinerja pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	%	80	80	100	Sangat Berhasil

Untuk mencapai target kinerja tersebut telah dilakukan berbagai upaya berupa penguatan reformasi birokrasi internal, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta upaya koordinasi dan

peningkatan kerjasama dengan instansi terkait.

Capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2022 juga didukung oleh anggaran dengan alokasi Rp. 43.253.956.136 dengan realisasi sebesar Rp. 42.828.540.406 atau dengan capaian 99,02%.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
RINGKASAN EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
C. Faktor - Faktor Kunci Keberhasilan	6
D. Maksud dan Tujuan	9
E. Sistematika Penyajian	10
 BAB II : PERENCANAAN KINERJA	 12
A. Perencanaan Strategis	12
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	15
 BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	 18
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
B. Realisasi Anggaran	43
 BAB IV : PENUTUP	 45
 LAMPIRAN - LAMPIRAN :	
LAMPIRAN 1 : RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN KEDUA TAHUN 2020-2024	
LAMPIRAN 2 : RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022	
LAMPIRAN 3 : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	
LAMPIRAN 4 : LAMPIRAN-LAMPIRAN LAINNYA	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Perhubungan sebagai unsur teknis pelaksanaan otonomi daerah di Kota Pontianak yang melaksanakan kewenangan di bidang Perhubungan serta tugas desentralisasi Pemerintah Kota Pontianak, yang sebelumnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Dinas Daerah Kota Pontianak sebagai unsur pelaksanaan otonomi daerah tepatnya pada Pasal 13 ditetapkan Pembentukan Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2005.

Dalam penilaian dan evaluasi yang dilakukan dengan pengukuran keberhasilan maupun kegagalan masih sulit dilakukan secara objektif. Kesulitan ini diantaranya disebabkan masih lemahnya data yang ada dan pengukuran kinerja selama ini lebih ditekankan pada kemampuan dalam menyerap dana/anggaran.

Oleh karena itu perlu disusun suatu sistem pengukuran kinerja yang dapat memberikan informasi atas efektifitas dari aktifitas pencapaian Kinerja Dinas. Untuk mengukur kinerja ini maka seluruh aktifitas harus dapat diukur dari sisi input (masukan) dengan penekanan pada proses, keluaran, manfaat dan dampak dari program yang dibuat. Melalui pengukuran kinerja ini keberhasilan akan dapat dilihat dari kemampuan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kegiatan yang tertuang dalam rencana strategis tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-5 (lima).

Dinas Perhubungan Kota Pontianak memiliki peran yang strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Pontianak:

- a. Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan darat (lalu lintas) dan air;
- b. Meningkatkan dan menata parkir perkotaan;

- c. Menerangi tiap ruas jalan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak;
- d. Meningkatkan sistem pengangkutan sungai untuk menunjang sistem transportasi darat.

Adapun permasalahan utama atau isu strategis yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Pontianak secara umum yang terkait dengan Bidang Perhubungan, sebagai berikut :

- a. Penyediaan bahan kebijakan teknis berupa dokumen perencanaan umum bidang transportasi dan pemutakhiran data-data lalu lintas belum diwujudkan dengan optimal, antara lain penyusunan masterplan transportasi (Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan - RIJLLAJ dan Tatanan Rencana Transportasi Lokal - TATRALOK).
- b. Pertambahan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan penambahan ruas jalan dan ruang parkir sehingga mengakibatkan kemacetan di beberapa ruas jalan.
- c. Jumlah angkutan umum di Kota Pontianak semakin berkurang, hal tersebut disebabkan berkurangnya peminat/pengguna angkutan umum dan lebih banyak masyarakat menggunakan kendaraan pribadi.
- d. Pemanfaatan Terminal dan Halte di Kota Pontianak oleh masyarakat sangatlah kurang sehingga jumlah Halte dan Terminal justru semakin berkurang.
- e. Lemahnya Database berkaitan dengan Kebutuhan dan data yang ada mengenai kondisi fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu, marka dan *guardrill*, serta fasilitas lainnya seperti *traffic light*, *warning light*, *zebra cross* dan CCTV.
- f. Kondisi sebagian besar peralatan pengujian kendaraan bermotor merupakan peralatan tua serta kondisi bangunan gedung pengujian kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan kondisi dan jenis kendaraan saat ini (kendaraan besar dan berbadan tinggi) sehingga pengujian harus dilakukan secara manual yang tentunya berpengaruh pada keakuratan pengujian.

- g. Masih kurangnya personil dan tenaga/SDM yang mempunyai keahlian khusus (kompetensi) bidang terminal, pengujian kendaraan bermotor, Penyidik (PPNS) Bidang Perhubungan, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRL), evaluasi andalalin dan pengelolaan perparkiran.
- h. Kurang optimalnya pengawasan dan sosialisasi/pembinaan kepada masyarakat berkenaan dengan standar keselamatan, peraturan lalu lintas, terminal dan perparkiran.
- i. Masih lemahnya pemanfaatan dan penataan angkutan sungai sampan bermotor sebagai salah satu angkutan umum sungai dalam wilayah Kota Pontianak.
- j. Masih kurangnya penataan dan pemanfaatan dermaga sampan bermotor sebagai salah satu prasarana/fasilitas transportasi sungai bagi masyarakat, yang memberikan kemudahan, kenyamanan, keamanan dan kelancaran dalam menuju lokasi yang diinginkan.
- k. Kurang layaknya pelabuhan penyeberangan yang ada sehingga perlu dilakukan penataan dan pengembangan sehingga dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, keamanan dan kelancaran bagi masyarakat yang menggunakan angkutan penyeberangan.

B. TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 123 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak, bahwa Kepala Dinas Perhubungan mempunyai Tugas Pokok memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Dinas Perhubungan yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan;
- b. Perumusan program dan rencana kerja dibidang perhubungan;
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang perhubungan;
- d. Pengendalian dan pembinaan teknis dibidang perhubungan;
- e. Penyelenggaraan fasilitasi perizinan dibidang perhubungan;
- f. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perhubungan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain dibidang perhubungan yang diberikan oleh Walikota.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, dan Kepala UPT serta masing-masing Kasubbag dan Kasi.

2. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pontianak terdiri dari :

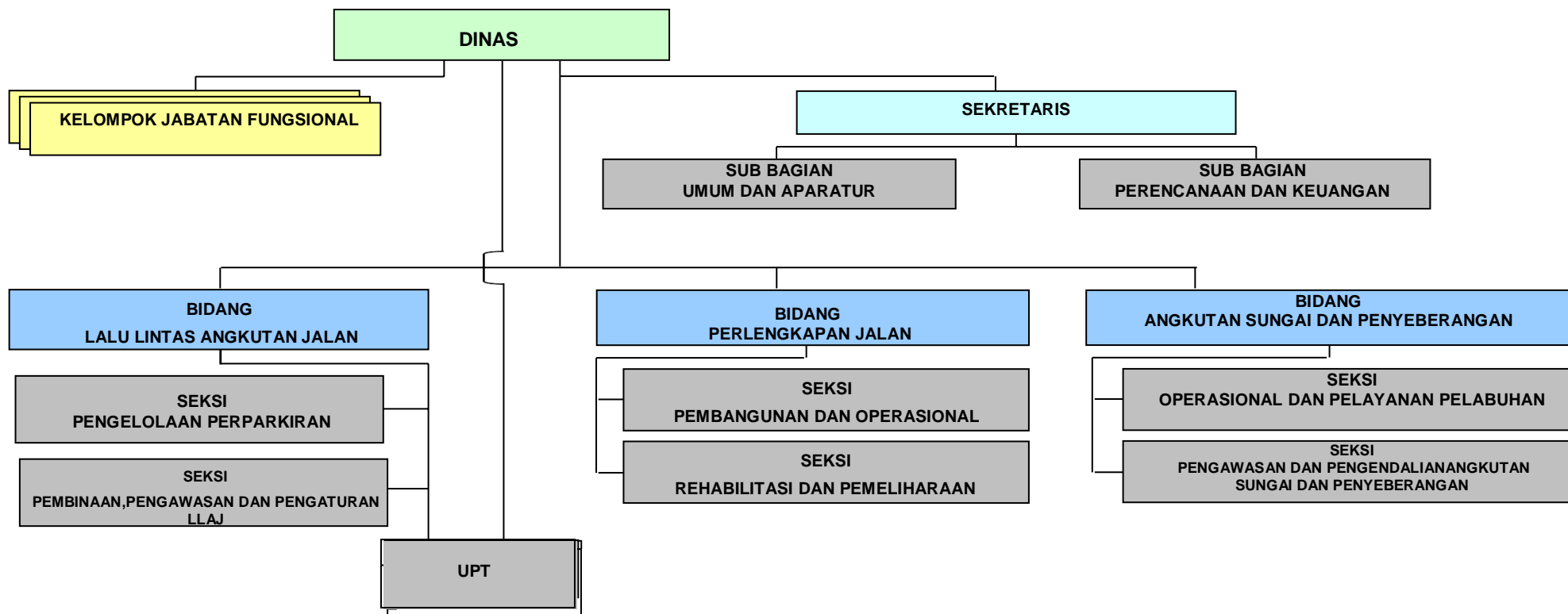
- a. **Kepala Dinas**
- b. **Sekretaris Dinas**
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. **Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan**
 1. Kepala Seksi Pengelolaan Perparkiran
 2. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- d. **Kepala Bidang Perlengkapan Jalan**
 1. Kepala Seksi Pembangunan dan Operasional
 2. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan
- e. **Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Penyeberangan**
 1. Kepala Seksi Operasional dan Pelayanan Pelabuhan
 2. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Sungai dan Penyeberangan
- f. **Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)**
- g. **Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu**

Secara jelas dapat dilihat pada struktur berikut:

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK

PERWA NOMOR 123 TAHUN 2021



C. FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

1. Sumber Daya Manusia

Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan sumber daya yang memadai agar kegiatan dapat terlaksana dengan cepat, tepat, transparan dan akuntabel, sehingga berdampak pada kinerja suatu instansi pemerintah.

Sumber daya yang dimaksud adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Non Apartur Sipil Negara (Non ASN) yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kedudukan jabatan masing-masing mulai dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, hingga Staf.

Pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak didukung oleh 125 orang personil, yang terdiri dari 63 orang ASN dan 62 orang Non ASN. Komposisi personil Dinas Perhubungan Kota Pontianak pada tahun 2022 ini sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Formasi Kepangkatan Pegawai Dinas Perhubungan Kota Pontianak

NO	GOL/ RUANG	JUMLAH PNS (ORANG)		
		LK	PR	LK + PR
1	2	3	4	5
1	IV/c	-	1	1
2	IV/b	1	-	1
3	IV/a	3	-	3
4	III/d	8	3	11
5	III/c	6	3	9
6	III/b	4	2	6
7	III/a	6	2	8
8	II/d	18	1	19
9	II/c	-	3	3
10	II/b	-	2	2
11	II/a	-	-	-
JUMLAH		46	17	63

Tabel 1.2
Formasi Kepangkatan Pegawai
Dinas Perhubungan Kota Pontianak

NO	GOL/ RUANG	JUMLAH PNS (ORANG)		
		LK	PR	LK + PR
1	2	3	4	5
1	IV	4	1	5
2	III	24	10	34
3	II	18	6	24
4	I	-	-	-
JUMLAH		46	17	63

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kota Pontianak

NO	JENIS PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI (ORANG)		
		LK	PR	LK + PR
1	2	3	4	5
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	46	17	63
2	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	-	-	-
3	Non ASN	55	7	62
JUMLAH		101	24	125

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kota Pontianak
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI (ORANG)		
		LK	PR	LK + PR
1	2	3	4	5
1	Magister (S-2)	4	2	6
2	Sarjana (S-1)	16	7	23
3	Diploma IV (D-4)	-	-	-
4	Sarjana Muda (D-3)	4	2	6
5	Sarjana Muda (D-2)	2	-	2
6	SMA / Sederajat	24	2	26
7	SMP / Sederajat	-	-	-
8	SD	-	-	-
JUMLAH		50	13	63

Dari komposisi personil berdasarkan pendidikan memang dirasakan masih perlu peningkatan kemampuan personil baik melalui pengembangan SDM lewat diklat/pelatihan khusus bidang Perhubungan maupun pengembangan tingkat pendidikan (D-III,D-IV, S-1, S-2) yang sesuai dengan formasi yang dibutuhkan, sehingga kemampuan dan wawasan personil meningkat sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu juga perlu adanya penambahan personil baru yang sesuai dengan keahlian dan formasi yang dibutuhkan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

2. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai agar proses pencapaian tujuan yang diharapkan dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak masalah sarana dan prasarana memang masih dirasakan kurang memadai, namun dengan keterbatasan yang ada tentunya kita berupaya semaksimal mungkin melaksanakan tugas yang diemban dan tentunya kedepan terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana yang ada sehingga efektifitas dan efisiensi dapat terus tercipta.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kota Pontianak diantaranya Peningkatan Fasilitas dan Perbaikan Gedung/Kantor serta peralatan yang rusak, Penggantian dan Pengadaan peralatan kantor, Penambahan/Pengadaan serta pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional lapangan baik roda dua, empat, dan roda enam guna mendukung pengawasan dan patroli, pemeliharaan PJU serta peningkatan sarana dan prasarana UPT berupa sarana mobilitas, sarana efisiensi kerja dan prasarana kantor serta peralatan pengujian kendaraan bermotor yang akan dilakukan secara bertahap.

3. Sumber Dana

Sumber Dana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pontianak berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2022 dengan total anggaran sebesar Rp. 43.253.956.136 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.5
Anggaran Belanja Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2022

No	Jenis Belanja	Anggaran
1	Belanja Operasi	42.365.492.716
	-Belanja Pegawai	9.150.200.691
	-Belanja Barang dan Jasa	33.215.292.025
2	Belanja Modal	888.463.420
	<i>Jumlah</i>	43.253.956.136

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mempunyai dua fungsi utama. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*. Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja instansi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Dinas Perhubungan Kota Potianak Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2022 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2022. Esensi capaian kinerja yang berhasil dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai sampai dengan tahun 2022.

2. **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP Tahun 2022 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Dinas Perhubungan Kota Pontianak dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2021 disajikan berpedoman pada PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah khususnya Lampiran II. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

SAMPUL

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
 - Tugas Pokok dan Fungsi
 - Struktur Organisasi
- C. Faktor – Faktor Kunci Keberhasilan
 - Sumber Daya Manusia
 - Kondisi Sarana dan Prasarana
 - Sumber Dana
- D. Maksud Dan Tujuan
- E. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan pada masa depan tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan menyusun suatu perencanaan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya secara berkesinambungan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam hal ini periode Tahun 2020-2024 sesuai dengan periode RPJMD Kepala Daerah. Proses inilah yang akan menghasilkan Rencana Strategi (Renstra) instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana Strategis yang diuraikan pada bab ini adalah Rencana Strategis tahun 2020-2024, yang terdiri 7 (tujuh) komponen yaitu : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, Kebijakan dan Program serta Penanggungjawab Program.

1. *Pernyataan Visi*

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Perhubungan Kota Pontianak secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcomes*).

Adapun perumusan Visi Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

TRANSPORTASI KOTA PONTIANAK YANG CERDAS, TERTIB, AMAN, LANCAR DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

2. *Pernyataan Misi*

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan instansi pemerintah, sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Dinas Perhubungan Kota Pontianak memiliki misi:

1. Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur yang Cerdas, dan Berbudaya (Mengacu pada Misi Ke-1 Kota)
2. Meningkatkan Pelayanan Administrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (Mengacu pada Misi Ke-3 Kota)
3. Meningkatkan Kualitas Penataan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Sungai (Mengacu pada Misi Ke-2 Kota)
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Keselamatan Transportasi Jalan dan Sungai (Mengacu pada Misi Ke-2 Kota).

Dari ke4 (empat) Misi yang ditetapkan di atas, secara jelas dapat dilihat dari uraian berikut ini :

MISI ke1 : *“Meningkatkan Pelayanan Administrasi, Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Serta Profesionalisme Sumber Daya Aparatur”.*

Misi ini ditetapkan dalam upaya untuk mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif, menciptakan profesionalisme birokrasi serta Sumber Daya Aparatur yang profesional, handal, dan memiliki wawasan pengetahuan, keterampilan, moral dan disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

MISI ke2 : *“Meningkatkan Pelayanan dan Penataan Sarana dan Prasarana Perhubungan untuk menciptakan Keamanan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas Darat dan Sungai”.*

Misi ini ditetapkan dalam upaya untuk menjadikan Transportasi di Kota Pontianak lebih disiplin, tertib, aman dan lancar melalui peningkatan pelayanan, pengendalian dan pengawasan melalui penataan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana perhubungan darat dan sungai yang memadai sesuai kebutuhan.

3. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi/penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai dan menghasilkan apa, dalam kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020–2024 adalah Meningkatkan Kualitas Transportasi di Kota Pontianak.

4. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam

jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 adalah:

- 1) Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja merupakan sebuah kesepakatan kinerja antara kedua belah pihak terhadap tingkat capaian kinerja yang akan dicapai dan dikaitkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan, dalam hal ini antara Pimpinan SKPD dengan Walikota. Perjanjian kinerja ini menjabarkan rencana program/kegiatan dan targetnya dikomitmenkan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak untuk dapat dicapai pada satu tahun anggaran, yaitu tahun 2022.

Perjanjian dan rencana kinerja tahunan 2022 sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Penetapan Kinerja tahun 2022, yang merupakan suatu perjanjian atau kontrak kinerja tahunan SKPD, yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja sasaran, target sasaran yang disusun berdasarkan indikator kinerja utama SKPD, program dan kegiatan beserta target keluaran (*output*) dan anggaran per program/kegiatan. Perjanjian kinerja ini akan menjembatani antara Rencana Strategis yang telah disusun dengan Laporan Akuntabilitas Kinerjanya setiap tahun.

Perjanjian kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak tahun 2022 didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2022, yang merupakan dokumen yang memberikan kewenangan kepada Dinas Perhubungan Kota Pontianak untuk mengelolanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk diketahui pada akhir bulan November Tahun 2022 setelah disahkannya DPPA, Dinas Perhubungan Kota Pontianak mendapat penambahan anggaran dikarenakan adanya kekurangan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan kekurangan pembayaran listrik Kota Pontianak dengan adanya kenaikan Tarif

Dasar Listrik (TDL) dari PLN. Adapun perubahan anggaran tersebut dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Anggaran Perubahan	Anggaran Perubahan Pergeseran
1	Belanja Operasi		42.365.492.716
	-Belanja Pegawai		9.150.200.691
	-Belanja Barang dan Jasa		33.215.292.025
2	Belanja Modal		888.463.420
	<i>Jumlah</i>		43.253.956.136

Maka dari itu akan terlihat ada perbedaan jumlah total anggaran pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 dengan Anggaran Perubahan Pergeseran Tahun 2022.

Adapun Capaian Kinerja yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Pontianak pada Tahun Anggaran 2022 yang akan dinilai dan dituangkan ke dalam LAKIP, hanya Sasaran Strategis Pembangunan beserta indikator kinerja sasaran dan target yang ingin dicapai. Sedangkan sasaran rutin kesekretariatan tidak dibahas. Tabel 2.1 berikut ini menampilkan Capaian kinerja dan target yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2022.

Tabel 2.1
Capaian Kinerja dan Target yang akan Dicapai
oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1. Meningkatnya Kualitas Transportasi	1. <i>Rata-Rata Waktu Tempuh</i>	Jam	0,05
2. Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2. Tingkat kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak	Kategori	B (80)
3. Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai dan Penyeberangan	3. Tingkat kinerja pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	%	80

Total anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan tercapainya 3 (tiga) sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak di luar sasaran strategis kesekretariatan sebagaimana dituangkan dalam DPPA Tahun 2022 adalah sebesar Rp.31.190.518.147 sebagaimana Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Anggaran Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1. <i>Meningkatnya Kualitas Transportasi</i>	1. <i>Rata-Rata Waktu Tempuh</i>		31.190.518.147
2. Meningkatkan Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2. Tingkat kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	30.062.639.947
3. Meningkatkan Kinerja Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai dan Penyeberangan	3. Tingkat kinerja pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	Pengelolaan Pelayaran	1.127.878.200

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan bagian penting dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen yang bersifat sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis SKPD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis SKPD. Pengukuran kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja SKPD tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan satuan target kinerja yang telah ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja sasaran dengan realisasi target kinerja yang diperoleh/dicapai melalui pelaksanaan program/kegiatan serta penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen pelaksanaan anggaran.

Pengukuran kinerja, memuat tentang sasaran strategis, indikator kinerja sasaran (*outcome*), target kinerja (*output*), realisasi, persentase capaian target kinerja, program/kegiatan, dan persentase realisasi anggaran per program/kegiatan. Inti dari pengukuran kinerja adalah membandingkan antara capaian kinerja yang diukur dengan indikator kinerja atau ukuran kinerja sebagai alat ukurnya serta dengan menggunakan metode pengukuran yang telah ditetapkan.

1.1 Metode Perbandingan Rencana dan Realisasi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- (a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- (b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Indikator Kinerja} = \frac{2 \times \text{Rencana} - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat diketahui dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

1.2 Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Interval	Kategori
> 85	= Sangat Berhasil
$70 < \bar{x} \leq 85$	= Berhasil
$55 < \bar{x} \leq 70$	= Cukup Berhasil
≤ 55	= Tidak Berhasil

2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah pemecahan masalah yang diambil instansi dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja disajikan secara sistematis berdasarkan format pengukuran kinerja, yaitu dengan terlebih dahulu menyajikan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran, target dan realisasinya, dan dilanjutkan dengan hasil pengukuran kinerja kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan, target dan realisasinya, dan realisasi anggarannya.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis, dilakukan analisis capaian kinerja, dengan :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja;
2. Membandingkan antara realisasi capaian kinerja sasaran tahun penilaian serta capaian kinerja sasaran beberapa tahun terakhir (sesuai Renstra berjalan);
3. Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada tahun Renstra sesuai dokumen Renstra;
4. Membandingkan realisasi kinerja dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sesuai Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja 2022, terbagi menjadi 1 (satu) sasaran RPJMD (tujuan renstra) yang merupakan IKU Kota, 2 (dua) sasaran strategis yaitu sasaran yang bersifat pelayanan administrasi (kesekretariatan) atau sasaran internal, dan sasaran yang bersifat pelayanan eksternal (strategis pembangunan) yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang harus dicapai. Adapun capaian kinerja sasaran yang diukur capaiannya pada LAKIP ini hanya terhadap 3 sasaran strategis pembangunan dan indikator kerjanya yang dicapai pada pelaksanaan anggaran tahun 2022.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka Dinas Perhubungan Kota Pontianak telah menetapkan Capaian Kinerja sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas. IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU Kota yang dijadikan IKU Dinas adalah sasaran RPJMD atau Tujuan Renstra dengan indikator kinerja rata-rata waktu tempuh merupakan salah satu indikator capaian keberhasilan Walikota. Dan IKU Dinas Perhubungan Kota Pontianak dari sasaran strategis yaitu:

- a. Tingkat Kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak.
- b. Tingkat Kinerja Pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan.

Analisis Capaian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi

Analisa terhadap Capaian Kinerja Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2022 (IKU Kota) dengan Sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya Kualitas Transportasi dengan indikator Rata-Rata Waktu Tempuh dan 2 Sasaran Strategis Dinas Perhubungan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1. Meningkatnya Kualitas Transportasi	1. Rata-Rata Waktu Tempuh	Jam	0,05	0,035	130	Sangat Berhasil
2. Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2. Tingkat kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak	Kategori/%	B (80%)	B (93,31%)	B (74,65%)	Berhasil
3. Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	3. Tingkat kinerja Pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	%	80	80	100	Sangat Berhasil

1) Sasaran RPJMD (IKU Kota)

Dari tabel pada Sasaran RPJMD Pemerintah Kota Pontianak, untuk Indikator Kinerja Utama tercermin dengan pencapaian indikator berikut :

1. Rata-Rata Waktu Tempuh

Rata-rata waktu tempuh merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak dalam 1 Km dengan kecepatan tidak melebihi batas kecepatan maksimal yang diijinkan (30 km/jam). Titik pantau yang dijadikan acuan adalah 12 ruas jalan utama yang ada di Kota Pontianak. Rata-rata waktu tempuh yang ingin dicapai sesuai dengan Target Renstra Dinas Perhubungan 2020-2024 adalah 0,05 jam.

Rata-rata waktu tempuh perjalanan di Kota Pontianak berdasarkan rencana dan hasil pengukuran pada tahun 2022 dapat digambarkan pada tabel berikut ini.

RATA-RATA WAKTU TEMPUH PERJALANAN DALAM KOTA

NO	NAMA JALAN	PANJANG (DALAM METER)		Waktu Tempuh		
				jam	menit	Kec. Rata2
1	JL. IMAM BONJOL	1,860	M	0,06	3,72	29,96
2	JL. ADI SUCIPTO	1,500	M	0,06	3,30	27,23
3	JL. HASANUDIN	0,730	M	0,03	1,64	26,77
4	JL. H. RA. RAHMAN	2,110	M	0,10	5,88	21,53
5	JL. HUSEIN HAMZAH	3,819	M	0,13	7,77	29,51
6	JL. KOM. YOS SUDARSO	5,680	M	0,21	12,44	27,38
7	JL. PAK KASIH	0,690	M	0,02	1,34	30,79
8	JL. RAHADI USMAN	0,370	M	0,01	0,84	26,42
9	JL. PAHLAWAN	0,350	M	0,01	0,66	31,89
10	JL. TANJUNGPURA	2,110	M	0,07	4,10	30,89
11	JL. AHMAD YANI	3,360	M	0,11	6,58	30,66
12	JL. VETERAN	0,690	M	0,02	1,48	27,99
			kec rata2	0,83	49,75	28,42

Untuk lebih jelas dapat dijabarkan sebagai berikut :

Sasaran Strategis dari Sasaran RPJMD (Tujuan Renstra) dengan Indikator Kinerja Utama Rata-Rata Waktu Tempuh yang merupakan IKU Kota dengan capaian kinerja tahun 2022 adalah 0,035 jam dalam kategori **Sangat Berhasil**.

Pengukuran rata-rata waktu tempuh perjalanan dalam Kota Pontianak pada 12 ruas jalan terpilih yang dapat dianggap mewakili kondisi lalu lintas di Kota Pontianak. Ruas jalan tersebut adalah Jl. Imam Bonjol, Jl. Adi Sucipto, Jl. Hasanudin, Jl. H.RA. Rahman, Jl. Husein Hamzah, Jl. Kom Yos Sudarso, Jl. Pak Kasih, Jl. Rahadi Usman, Jl. Pahlawan, Jl. Tanjungpura, Jl. Ahmad Yani dan Veteran. Ke-12 ruas jalan tersebut memiliki batas kecepatan maksimal yaitu 30 km/jam.

Untuk mengukur waktu tempuh pada ruas jalan terpilih menggunakan rumusan sebagai berikut :

$$\frac{\text{rata-rata jarak tempuh (s)}}{\text{rata-rata kecepatan (v)}} = (t) \text{ jam}$$

$$\frac{1}{28,42} = 0,035$$

$$\text{Indikator kinerja} = \frac{0,05 - (0,035 - 0,05)}{0,05} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{0,05 - (-0,015)}{0,05} \times 100\% \\
 &= \frac{0,065}{0,05} \times 100\% \\
 &= \underline{130\%}
 \end{aligned}$$

Capaian Kinerja Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2022 pada indikator rata-rata waktu tempuh Tahun 2022 yaitu 0,035 jam (2 menit 1 detik). Capaian kinerja ini lebih cepat dibandingkan dengan target sebesar 0,05 jam (3 menit 11 detik). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama Meningkatnya Kualitas Transportasi di Tahun 2022 dikategorikan **Sangat Berhasil**. Dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 130%. Pada indikator ini realisasi dikatakan tercapai, karena realisasi lebih cepat dibandingkan target.

Tabel
Capaian Kinerja Sasaran Strategis (Sasaran RPJMD/Tujuan Renstra)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Meningkatnya Kualitas Transportasi	Rata-Rata Waktu Tempuh	Jam	0,05	0,035	130	Sangat Berhasil

Adapun Program yang mendukung adalah :

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Dengan Kegiatan sebagai berikut :

✓ Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

✓ Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

✓ Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan
3. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

✓ Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan

Sub Kegiatan :

1. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan
2. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
3. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

✓ Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

b. Program Pengelolaan Pelayaran

Dengan Kegiatan sebagai berikut :

✓ Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

Sub Kegiatan :

1. Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
2. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau
3. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

2) Sasaran Strategis I : Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sasaran ini diarahkan untuk mewujudkan tujuan Misi 4 Dinas Perhubungan Kota Pontianak yaitu, *“Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Keselamatan Transportasi Jalan dan Sungai”*.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut pada tahun 2022 dicapai melalui 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu:

2.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak

Untuk mengukur indikator kinerja Tingkat Kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak, maka dilaksanakan dengan 1 (satu) program, 5 (lima) kegiatan dan 13 sub kegiatan. Untuk itu capaian yang tercapai adalah sebagai berikut:

Tabel
Capaian Tingkat Kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak Tahun 2022
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

No	Tingkat Kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak	Target	Realisasi	%	Kategori
1	Jumlah Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan	17 jenis	17 jenis	100	Sangat Berhasil
2	Jumlah Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2 kegiatan	2 kegiatan	100	Sangat Berhasil
3	Jumlah Angkutan Orang yang Tersedia	10 unit	10 unit	100	Sangat Berhasil
4	Jumlah Lokasi penyelenggaraan dan pengawasan titik perparkiran	300 Titik	300 Titik	100	Sangat Berhasil
5	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji	16.700 unit	11.118 unit	66,57	Cukup Berhasil
	Rata - Rata	100%		93,31	Sangat Berhasil
	% Capaian	80%		74,65	Berhasil

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator kinerja Tingkat Kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak dengan nilai capaian 74,65% dari target 80% atau dengan kategori **Berhasil**.

2.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak

Melalui 1 Program Tahun 2022, yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan indikator Persentase Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan.

Terdiri dari Kegiatan dan Sub Kegiatan, yang penjelasan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1.) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dengan indikator Jumlah Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan dengan target kinerja 17 jenis perlengkapan jalan dan terealisasi 17 jenis perlengkapan jalan.

Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan dengan indikatornya yaitu :

- a.) *Jumlah Prasarana Jalan yang dibangun*

Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota. Anggaran Sub Kegiatan ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp.898.160.000 dan terealisasi Rp.897.895.600 atau 99,97%.

Di dalam Sub kegiatan ini terdapat beberapa pekerjaan yaitu :

Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light, terlaksana pada 2 lokasi yaitu di simpang 3 Jl. Uray Bawadi - St. Syahrir dan simpang 4 Jl. Ampera - M. Yamin. Untuk pekerjaan pembangunan PJU Jl. Husein Hamzah tidak terlaksana karena adanya rasionalisasi anggaran sehingga di drop.

- b.) *Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan*

Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota. Anggaran

Sub Kegiatan ini sebesar Rp.1.824.682.782 dan terealisasi Rp.1.796.563.700 atau 98,45%.

Di dalam Sub kegiatan ini terdapat beberapa pekerjaan yaitu :

- Pengadaan meterisasi tidak terlaksana karena adanya rasionalisasi anggaran sehingga di drop.
- Pengecatan Zona Selamat Sekolah, ini dilaksanakan pada 3 lokasi pada Tahun 2022 yaitu : 1. Sekolah Marie Joseph, 2. Sekolah SMPN.14 Jalan Tani, 3. SDN.34 Kemuning. *Outcome* dari kegiatan ini adalah untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas di kawasan sekolah dengan memberikan peringatan kepada pengendara kendaraan bermotor agar mengurangi kecepatan kendaraan. Jumlah dan lokasi ZoSS yang ada di Kota Pontianak hingga akhir 2021 berjumlah 24 lokasi. Pada tahun 2022 pembuatan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) dilakukan pada 3 lokasi, sehingga jumlah ZoSS yang ada menjadi 27 yang mana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO	NAMA LOKASI DAN JALAN	TAHUN PEMBUATAN
1.	Depan SMP Negeri 9Jl. Pangeran Nata Kesuma	2014
2.	Depan SD Negeri 34Jl. Prof. Muhammad Yamin	2014
3.	Depan SD Negeri 17Jl. Putri Candra Midi	2015
4.	Depan SD BawamaiJl. KH. Ahmad Dahlan	2015
5.	Depan SD Bina 45Jl. Tanjung Raya II	2015
6.	Depan SDN 3 dan MTS Al-IrsyadJl. Tanjung Raya II	2015
7	Depan SMP Negeri 1Jl. Merdeka	2016
8	Depan SMKN 1Jl. Danau Sentarum	2016
9	Depan SD BawariJl. Merdeka	2016
10	Depan SD Negeri 01Jl. Suprpto	2016
11	Depan MIN Pal VJl. Husein Hamzah	2016
12	SMP Negeri 13Jl. Tebu	2017
13	SMP Negeri 5Jl. Hasanudin	2017
14	SMK Negeri 2Jl. Khatulistiwa	2017
15	SMP Negeri 10 Jl. WR. Supratman	2018
16	SMP Negeri 16 Jl. Martadinata	2018
17	SD Negeri 31 Jl. Tabrani Ahmad	2018

NO	NAMA LOKASI DAN JALAN	TAHUN PEMBUATAN
18	SD Negeri 34 Kec. Pontianak Kota	2019
19	SD Negeri 06 Kec. Pontianak Selatan Jl. S. Parman	2019
20	SMPN 19 Jl. Ampera	2020
21	SDN 35 Pontianak Selatan Jl. Nirbaya	2020
22	Sekolah Kanisius	2021
23	Sekolah Maranatha	2021
24	SD Fajar Harapan	2021
25	Sekolah Marie Joseph	2022
26	SMPN.14 Jl. Tani	2022
27	SDN.34 Kemuning	2022

- Pengecatan Marka Jalan, di lakukan pada 11 lokasi sesuai dengan target pelaksanaan, diantaranya lokasi pd Jl. St. Abdurahman, Jl. St. Syahrir, Jl. M. Yamin, Jl. Gajahmada, Jl. Sugiyono, Jl. Tanjungpura, dan Jl. A.Yani Simpang Pajak.
- Pengecatan Marka Parkir, dilakukan pada Jl. Putri Candramidi-Masjid Al Jihad, Jl. Aliyang (Depan Kantor Dinas Perhubungan Kota Pontianak), Jl. Johan Idrus (Depan Polresta)
- Pengecatan Zebra Cross, dilaksanakan pada 11 lokasi/simpang, yaitu :
 - Simpang Pajak
 - Simpang Aliyang - Khw. Hasyim
 - Simpang Katedral
 - Simpang Pattimura
 - Simpang Flamboyan
 - Simpang Danau Sentarum
 - Masjid Attawabin Jl. Hos. Cokroaminoto
 - Masjid Baiturohim Jl. Husein Hamzah
 - MIN Depan Asrama Hidayat Jl. Aliyang
 - SD Kalam Kudus Jl. Purnama
 - MTSN 2 Jl. M. Yamin
- Pengadaan CCTV
- Flashing Light di lakukan pada simpang Antasari-Sisingamaraja
- Pengadaan dan Pemasangan Rambu, terealisasi sebanyak 58 rambu tahun 2022.

- Mobile CCTV Pengawas Lalu Lintas
- Peralatan Pemantau Kepadatan Lalu Lintas

c.) *Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas*

Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan. Anggaran Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.23.178.254.880 dan terealisasi Rp.23.098.508.989 atau 99,65%. Kegiatan ini di dominasi oleh kegiatan pembiayaan pembayaran rekening PJU di Kota Pontianak.

Di dalam Sub kegiatan ini terdapat beberapa pekerjaan yaitu :

Pemeliharaan rambu-rambu, Pemeliharaan PJU, Pemeliharaan ATCS/CCTV, Pemeliharaan Flashing Light, Pemeliharaan Traffic Light, PeningkatamTraffic Light, Rehabilitasi F.O (Lokasi Rumah Radank-Bundaran Kota Baru, Bundaran Kota Baru-Simpang Tani Makmur, Simpang Tani Makmur-Simpang Ampera, Simpang Polda-DPRD Provinsi, Simpang Tanjungraya 1-Sipang Panglima Aim) dan pembayaran rekening PJU.

2.) *Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja Kegiatan adalah Jumlah Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.*

Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan dengan indikatornya yaitu :

a.) *Jumlah Dokumen hasil rekayasa lalu lintas yang dibuat*

Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota di drop sehingga tidak dilaksanakan.

b.) *Jumlah lokasi yang dilakukan pengawasan dan rekayasa lalu lintas*

Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.906.397.000 dan terealisasi Rp.901.621.300 atau 99,47%.

c.) *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Bidang LLAJ*

Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp.74.000.000 dan terealisasi Rp.74.000.000 atau 100%.

3.) *Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja Jumlah Angkutan Orang yang tersedia.*

Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan dengan indikatornya yaitu :

a.) *Tersedianya Unit Bus BRT dalam kondisi baik.*

Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.575.940.400 dan realisasi Rp.575.418.463 atau 99,9%.

b.) *Jangka waktu Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang*

Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.61.495.200 dan terealisasi Rp.61.402.900 atau 99,85%.

- 4.) Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, dengan indikator kinerja Jumlah Lokasi penyelenggaraan dan pengawasan titik perparkiran.

Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan dengan indikatornya yaitu :

- a.) *Jumlah Lokasi penyelenggaraan dan pengawasan titik perparkiran*

Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin dengan anggaran Rp.1.901.728.385 dan terealisasi Rp. 1.854.084.698 atau 97,5%.

- 5.) Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan indikator kinerja Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji.

Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan dengan indikatornya yaitu :

- a.) *Jumlah sarana dan prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang disediakan*

Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor dengan anggaran Rp.281.779.770 dan realisasi Rp.279.338.000. atau 99,1%. Adapun target dalam kegiatan ini adalah 2 paket yaitu pengecoran halaman parkir dan pengadaan aplikasi SimPKB.



b.) *Jumlah Alat Pengujian yang dilakukan pemeliharaan*

Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan anggaran sebesar Rp.283.029.930 dan terealisasi Rp.275.453.817 atau 97,32%. Sub Kegiatan ini mempunyai target 2 paket pekerjaan yang telah terealisasi yaitu pemeliharaan Gedung kantor Pengujian Kendaraan Bermotor dan pemeliharaan peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor.



c.) *Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor*

Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan dengan anggaran Rp.77.171.600 dan terealisasi Rp.75.763.100 atau 98,17%.

Rekapitulasi Jumlah Kendaraan yang Diuji pada Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2014-2021

TAHUN	TARGET	REALISASI	Capaian %
2014	16.312 Unit	10.401 Unit	63,76
2015	13.299 Unit	12.239 Unit	92,03
2016	15.851 Unit	14.715 Unit	92,83
2017	15.492 Unit	14.139 Unit	91,27
2018	15.870 Unit	12.441 Unit	78,39
2019	15.942 Unit	12.533 Unit	78,62
2020	16.000 Unit	11.236 Unit	70,23
2021	16.300 Unit	11.680 Unit	71,65
2022	16.700 Unit	11.118 Unit	66,57

3) Sasaran Strategis II : Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan

Untuk mewujudkan sasaran tersebut pada tahun 2022 dicapai melalui 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu:

3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan

Untuk mengukur indikator kinerja Tingkat Kinerja Pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan, dilaksanakan dengan 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan. Untuk itu capaian yang tercapai adalah sebagai berikut :

Tabel

Capaian Tingkat Kinerja Pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan Tahun 2022
Program Pengelolaan Pelayaran

No	Tingkat Kinerja Pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	Target	Realisasi	%	Kategori
1	Jumlah Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pengawasan pada Pelabuhan dan Angkutan Penyeberangan	2 kegiatan	2 kegiatan	100	Sangat Berhasil
	Rata - Rata	100%		100	Sangat Berhasil
	% Capaian	80%		80	Sangat Berhasil

3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan

Melalui 1 Program Tahun 2022, yaitu :

1. Program Pengelolaan Pelayaran, dengan indikator Persentase Pembangunan Fasilitas yang dibangun, Pemeliharaan, dan Pengawasan pada Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan.

Terdiri dari Kegiatan dan Sub Kegiatan, yang penjelasan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1.) Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau, dengan indikator

Jumlah Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pengawasan pada Pelabuhan dan Angkutan Penyeberangan, dengan target kinerja 2 kegiatan dan terealisasi 2 kegiatan.

Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan dengan indikator sebagai berikut :

a.) *Jumlah Fasilitas Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan yang dibangun*

Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Pembangunan pelabuhan sungai dan danau. Sub kegiatan ini tidak terlaksana karena adanya rasionalisasi anggaran sehingga di drop.

b.) *Jumlah pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan.*

Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau dengan anggaran sebesar Rp.758.941.200 dan terealisasi Rp.756.992.000 atau 99,74%. Sub Kegiatan ini dilaksanakan 365 hari dalam setahun.

c.) *Jumlah pengawasan pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan*

Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau dengan anggaran sebesar Rp.368.937.000 dan terealisasi Rp.364.464.000 atau 98,78%.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Terkait dengan indikator kinerja IKU Kota rata-rata waktu tempuh analisa perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan satu tahun terakhir yaitu Tahun 2021. Sejak tahun 2020, Dinas Perhubungan Kota Pontianak memangku Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pontianak yaitu Meningkatkan Kualitas Transportasi dengan indikator Rata-Rata Waktu Tempuh. Tabel dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021 dan 2022

Sasaran	Indikator	Unit	2021				2022			
			Target	Realisasi	Capaian	Ket	Target	Realisasi	Capaian	Ket
Meningkatnya Kualitas Transportasi	Rata-Rata Waktu Tempuh	Jam	0,05	0,044	112	Sangat Berhasil	0,05	0,035	130	Sangat Berhasil
Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tingkat Kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak.	Tingkat Layanan	B	B	B	Berhasil	B (80)	B (93,31)	B (74,65)	Berhasil
Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	Tingkat Kinerja Pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	Tingkat Layanan	80%	80%	100%	Sangat Berhasil	80%	80%	100%	Sangat Berhasil

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD

Tabel berikut menunjukkan perbandingan Capaian Kinerja dan target RPJMD tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tabel
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Tahun 2021 dan Target Jangka Menengah Renstra/RPJMD

Sasaran	Indikator	Satuan	Target (%)					Realisasi (%)		Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2022	Capaian	
Meningkatnya Kualitas Transportasi	Rata-Rata Waktu Tempuh	jam	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,035	130	Sangat Berhasil
Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tingkat Kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak.	Tingkat Layanan	B	B	B (80)	B	B	B (93,31)	B (74,65)	Berhasil
Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	Tingkat Kinerja Pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	Tingkat Layanan	80%	80%	80%	82%	82%	80%	100%	Sangat Berhasil

Berdasarkan Tabel diatas untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota rata-rata waktu tempuh dari awal tahun periode revisi renstra 2021 sampai dengan akhir tahun periode 2024 dengan target 0,05 jam. Untuk tahun 2022 terealisasi 0,035 jam. Capaian kinerja mencapai 130% dengan kategori sangat berhasil. Semakin tinggi kecepatan yang digunakan maka semakin sedikit waktu yang dibutuhkan. Indikator Tingkat Kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak untuk target tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 dengan kategori yang sama yaitu dengan kategori B dari tahun ke tahun sedangkan capaian kinerja tahun 2022 adalah B (74,65%) dari target B (80%) sehingga sudah tercapai nilai capaiannya dan dikategorikan Berhasil.

Untuk Indikator Kinerja Tingkat Kinerja Pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan untuk target tahun 2021 dan tahun 2022 adalah 80%, sedangkan target tahun 2023 dan tahun 2024 adalah 82%. Tahun 2022 capaian kinerja mencapai 80% dari target 80% dengan capaian kinerja 100% dengan kategori Sangat berhasil.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional

Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pontianak dengan sasaran Meningkatnya kualitas transportasi dengan indikator rata-rata waktu tempuh tidak terdapat dalam standar nasional. Oleh karena itu analisis capaian kinerja tidak dapat di bandingkan. Begitu juga dengan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perhubungan tidak terdapat dalam standar nasional.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan serta Solusi Alternatif Sasaran

Pada Tabel menyajikan Analisis Penyebab dan Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi Penurunan Capaian ataupun mengoptimalkan Capaian.

Tabel
Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Keberhasilan/Kegagalan	Penyebab	Solusi yang Dilakukan
-------------------------	------------------------	----------	-----------------------

1. Meningkatnya Kualitas Transportasi	Realisasi tingkat capaian rata-rata waktu tempuh adalah 0,035 jam dari target 0,05 jam dengan capaian kinerja 130%	<ul style="list-style-type: none"> - Berkurangnya kendaraan yang parkir menggunakan badan jalan - Kendaraan container tidak boleh beroperasi di jalan pada jam-jam tertentu sesuai dengan Perwa 48 Tahun 2016 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengaturan lalu lintas - Dilakukan penertiban parkir - Adanya razia penertiban kendaraan angkutan barang dan orang
2. Tingkat kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak	Realisasi sebesar 93,31% dari target 100% dan capaian kinerja 74,65% atas target 80%	<ul style="list-style-type: none"> - Program/kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang disusun 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas perencanaan sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan
3. Tingkat kinerja pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	Realisasi sebesar 80% dari target 80% dengan capaian kinerja 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program/kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang disusun 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas perencanaan sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran

Tabel berikut menampilkan analisa efisiensi sumber daya untuk IKU Dinas Perhubungan Kota Pontianak dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel
Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Transportasi	Rata-Rata Waktu Tempuh		31.190.518.147	31.011.506.567	99,43
Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tingkat kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	30.062.639.947	29.890.050.567	99,43
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	25.901.097.662	25.792.968.289	98,58
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	980.397.000	975.621.300	99,51
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	637.435.600	636.821.363	99,90

		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1.901.728.385	1.854.084.698	97,49
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	641.981.300	630.554.917	98,22
<i>Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan</i>	<i>Tingkat kinerja pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan</i>	<i>Program Pengelolaan Pelayaran</i>	1.127.878.200	1.121.456.000	99,43
		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian	1.127.878.200	1.121.456.000	99,43
		JUMLAH	31.190.518.147	31.011.506.567	99,43

- Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota rata-rata waktu tempuh dengan anggaran Rp. 31.190.518.147 dan terealisasi Rp. 31.011.506.567 maka terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.179.011.580. Indikator ini merupakan akumulasi dari indikator kinerja sasaran strategis dan program pendukung capaian pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak.
- Indikator Kinerja Tingkat kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak terdapat efisiensi anggaran pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan target sebesar Rp.30.062.639.947 dan terealisasi Rp.29.890.050.567. Efisiensi anggaran sebesar Rp.172.589.380.
- Indikator Kinerja Tingkat kinerja Pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan dengan target terdapat efisiensi anggaran pada Program Pengelolaan Pelayaran sebesar Rp.1.127.878.200 dan terealisasi Rp.1.121.456.000. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.6.422.200.

7. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pada tabel menampilkan analisa program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja. Analisa untuk masing-masing

indikator sebagai berikut :

Indikator	Program/Kegiatan	2022			Ket
		Target	Realisasi	(%)	
Rata-rata waktu tempuh		0,05	0,035	130	Sangat Berhasil
<i>Tingkat kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak</i>	<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</i>				
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	17 jenis	17 jenis	100	Sangat Berhasil
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	Sangat Berhasil
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 unit	10 unit	100	Sangat Berhasil
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	300 titik	300 titik	100	Sangat Berhasil
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	16.700 unit	11.118 unit	66,57	Cukup Berhasil
<i>Tingkat kinerja pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan</i>	<i>Program Pengelolaan Pelayanan</i>				
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	2 kegiatan	2 kegiatan	100	Sangat Berhasil

- Indikator rata-rata waktu tempuh dengan target 0,05 jam dan realisasi 0,035 jam dan capaian 130% di dukung oleh semua program yang ada dalam DPPA Dinas Perhubungan Kota Pontianak, khususnya program-program strategis/pembangunan.
- Indikator Tingkat kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak dilaksanakan dengan 1 (satu) program dan 5 (lima) kegiatan dan 11 sub kegiatan. Penjelasan untuk tiap-tiap sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
 1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, indikator sub kegiatan ini yaitu jumlah penyediaan perlengkapan jalan dan pendukung lalu lintas yang tersedia adalah sebanyak 9 jenis dari target

- 8 jenis. Adapun pekerjaan yang terlaksana yaitu Zebra Cross, ZoSS, Marka Jalan, Marka Parkir, Flashing Light, Rambu Lalu Lintas, Mobile CCTV Pengawas Lalu Lintas, CCTV, Peralatan Pemantau Kepadatan Lalu Lintas. Pengadaan pekerjaan meterisasi (PJU) tidak terlaksana dikarenakan anggaran dirasionalisasi/di drop.
2. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, tidak dilaksanakan karena adanya rasionalisasi anggaran sehingga sub kegiatan di drop.
 3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan, indikator sub kegiatan adalah jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan dan pendukung lalu lintas, yaitu tercapai 8 jenis pemeliharaan diantaranya peningkatan traffic light, pemeliharaan traffic light, flashing light, rambu lalu lintas, ATCS/CCTV, rehabilitasi F.O, pembayaran rekening listrik Kota Pontianak dan pemeliharaan PJU.
- Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan, dengan target indikator jumlah kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas yaitu 3 kegiatan dan tercapai 2 kegiatan ;
1. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan, sub kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan anggarannya di drop dalam anggaran perubahan.
 2. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/ Kota, dengan indikator sub kegiatan adalah jumlah lokasi yang dilakukan pengawasan dan rekayasa lalu lintas yaitu dengan kegiatan patroli di 25 lokasi.
 3. Forum Lalu Lintas dan Angkutran Jalan Kabupaten/Kota, dengan indikator sub kegiatan adalah jumlah dokumen hasil koordinasi bidang LLAJ. Terealisasi 10 bahan kebijakan yang dihasilkan dari target 10 bahan kebijakan. Sub kegiatan ini merupakan wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

- Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang, dengan indikator jumlah angkutan orang yang tersedia yaitu 10 unit kendaraan;
 1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator sub kegiatan adalah tersedianya unit bus BRT dalam kondisi baik adalah 10 unit dari target 10 unit kendaraan.
 2. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator sub kegiatan yaitu jangka waktu pengendalian dan pengawasan angkutan umum jasa angkutan orang terlaksana 365 hari atau 1 tahun kerja.

- Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan indikator jumlah lokasi penyelenggaraan dan pengawasan titik perparkiran terealisasi 300 titik perparkiran.

- Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 1. Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor, dengan indikator jumlah sarana dan prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang disediakan, dimana terealisasi 2 paket pekerjaan dari target 2 paket yaitu pengecoran halaman parkir dan pengadaan aplikasi SimPKB.
 2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan indikator jumlah alat pengujian yang dilakukan pemeliharaan. Terealisasi 2 paket pekerjaan yaitu pemeliharaan alat uji kendaraan dan pemeliharaan gedung PKB.

3. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan, dengan indikator jumlah kegiatan pengawasan pengujian kendaraan bermotor terealisasi 144 hari dari target 144 hari per tahun.
- Indikator Tingkat kinerja pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan dilaksanakan dengan 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Penjelasan untuk tiap-tiap kegiatan sebagai berikut :
 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian;
 1. Pembangunan Pelabuhan sungai dan danau, sub kegiatan ini tidak terlaksana dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran.
 2. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau, sub kegiatan terlaksana selama 365 hari.
 3. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau, sub kegiatan dilakukan sebanyak 144 hari dalam setahun sesuai target yang ditetapkan. Pelaksanaan sub kegiatan ini diantaranya pengawasan sewa watas air dan pengendalian lalu lintas di sungai.

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022, diketahui besaran anggaran pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak adalah sebesar Rp. 43.253.956.136 dengan realisasi sebesar Rp. 42.828.540.406 dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Belanja dan Realisasi TA.2022

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	42.365.492.716	41.965.400.806	99,1
	- Belanja Pegawai	9.150.200.691	8.974.204.160	98,1
	- Belanja Barang dan Jasa	33.215.292.025	32.991.196.646	99,3
2	Belanja Modal	888.463.420	863.139.600	97,1
	Jumlah	43.253.956.136	42.828.540.406	99,02

Capaian Program dan Anggaran
Dinas Perhubungan Kota Pontianak TA. 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Transportasi	Rata-Rata Waktu Tempuh		31.190.518.147	31.011.506.567	99,43
Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tingkat kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	30.062.639.947	29.890.050.567	99,43
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	25.901.097.662	25.792.968.289	98,58
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	637.435.600	636.821.363	99,90
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	637.435.600	636.821.363	99,90
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1.901.728.385	1.854.084.698	97,49
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	641.981.300	630.554.917	98,22
Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	Tingkat kinerja pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	Program Pengelolaan Pelayanan	1.127.878.200	1.121.456.000	99,43
		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian	1.127.878.200	1.121.456.000	99,43
		JUMLAH	31.190.518.147	31.011.506.567	99,43

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2022 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2022, sesuai dengan bidang tugas Dinas Perhubungan Kota Pontianak yaitu memberikan pelayanan yang maksimal di bidang perhubungan serta menata sarana dan prasarana perhubungan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis, maka secara umum Dinas Perhubungan Kota Pontianak, telah dapat merealisasi pencapaian target sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2022, sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diamanahkan. Adapun pencapaian secara ringkas dapat dilihat sebagaimana berikut :

1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis *“Meningkatnya Kualitas Transportasi”* yang dicapai melalui indikator kinerja utama yaitu Rata-Rata Waktu Tempuh, dengan target 0,05 jam dan realisasi 0,035 jam dengan persentase capaian 130%, dengan kategori **Sangat Berhasil**.
2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis *“Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”* yang dicapai melalui indikator kinerja yaitu Tingkat Kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak, dengan target B (80%) dan realisasi B (93,31%) dengan capaian B (74,65) kategori **Berhasil**.
3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis *“Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan”* yang dicapai melalui indikator kinerja yaitu Tingkat Kinerja Pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan, dengan target 80%, realisasi 80% dengan persentase capaian 100% dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Akan tetapi, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai upaya mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Perhubungan Kota Pontianak pada Tahun 2022 tetap dihadapkan pada beberapa hambatan atau kendala. Kendala dan permasalahan tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat.

Demikian LAKIP ini kami sampaikan, semoga dapat dijadikan bahan masukan dan evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak di masa yang akan datang.